

MEMBANGUN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR

Slamet Widodo

STKIP Al Hikmah Surabaya
Email: slamet.10050@gmail.com

Abstract: *Corruption almost did in all of side government start from underling to elite. It is did massively by scandalist used various manner and type wich very complex without see the status. Therefore, need the effort for extirpate it, especially for elementary school students did prevently. It is effort can did with build anticorruption education in elementary school. This is have purpose for give knowledge, kind, and the manner prevent various corruption form. This research use a literature study method trough the data collecting from analysis resources books, articles, and of a kind it. Anticorruption education is the effort to do awarely for teach anticorruption education. Not only the teacher have obligation for teach it, but also headmaster as a leader in elementary school have important role to build anticorruption education. Curriculum of anticorruption education emphasized on all of lessons such as social studies, natural science, and language. Whereas for give various facilities the style of student study (visual, auditory, and cinesthetic), then teacher could use various models instruction so the activities learning not monotonous and students not bored quickly. The assessment could used on anticorruption education is authentic assessment.*

Keyword: *Anticorruption education, curriculum anticorruption education, authentic assessment.*

Abstrak: Korupsi terjadi hampir di semua segi pemerintahan mulai dari bawahan sampai elit. Korupsi dilakukan secara masif oleh pelakunya menggunakan berbagai cara dan bentuk yang sangat kompleks tanpa memandang status. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi korupsi tersebut, terutama bagi siswa sekolah dasar dilakukan dengan cara preventif. Usaha tersebut dilakukan dengan membangun pendidikan antikorupsi di sekolah dasar. Hal ini bertujuan memberikan pengetahuan, jenis, dan cara mencegah berbagai bentuk korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan cara pengumpulan data dari menganalisis sumber-sumber buku, artikel, dan sejenisnya. Hasil penelitian ini adalah cara yang efektif untuk membangun sekolah berbasis pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan siswa tentang antikorupsi. Tidak hanya guru saja yang memiliki kewajiban untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi, tetapi juga kepala sekolah sebagai *leader* di sekolah dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi. Kurikulum pendidikan antikorupsi ditekankan pada semua pelajaran yakni pelajaran sosial, sains, dan bahasa. Sedangkan untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa (*visual, auditory, dan kinesthetic*), maka guru dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga pembelajaran tidak monoton dan siswa tidak cepat bosan. Asesmen yang dapat digunakan dalam pendidikan antikorupsi adalah asesmen autentik.

Kata kunci: Pendidikan antikorupsi, kurikulum pendidikan antikorupsi, asesmen autentik

PENDAHULUAN

Pendidikan seharusnya mampu menciptakan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang baik, dan menguasai teknologi. Pendidikan menjadi wadah untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat luas. Berdasarkan bukti penelitian yang telah dilakukan di sekolah dasar dan menengah menunjukkan, bahwa pendidikan mampu membangun masyarakat menjadi lebih sehat, lebih kaya, dan lebih adil (Percy and Svenson, 2016). Selain menciptakan SDM yang berkualitas, seharusnya pendidikan dapat membangun manusia yang sadar dan tahu bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan terlarang. Pendidikan antikorupsi memberikan pemahaman kepada semua orang sehingga menjadikan kesadaran diri sendiri tanpa diingatkan orang lain untuk menghindari korupsi.

Kebanyakan korupsi dilakukan karena memberikan keuntungan bagi pelakunya. Korupsi hanya terjadi jika pegawai umum mengharapkan mendapat keuntungan bersih dari transaksi (Centner, 2008). Ketika ada kesempatan yang menguntungkan maka tingkat korupsi menjadi tinggi (Azfar, Lee, and Swamy, 2001). Seperti anak meminta uang saku

yang lebih dari uang saku yang diberikan pada hari-hari biasanya, dengan alasan untuk membeli alat tulis. Akan tetapi, sebenarnya uang saku tersebut tidak dibelikan alat tulis, melainkan untuk membeli jajanan. Kasus yang memberikan untung bagi pribadinya sendiri akan berdampak pada kasus-kasus lainnya. Anak akan berbuat dengan cara apapun asalkan dapat memberikan keuntungan. Kasus seperti itu hanyalah beberapa contoh kecil dari sekian banyak kasus. Masih banyak lagi perbuatan anak-anak yang lain mengarah pada perbuatan korupsi.

Menurut Becker, Hauser, dan Kronthaler (2013) kebanyakan siswa kesulitan untuk mengidentifikasi perbuatan yang termasuk korupsi dan akibat apa yang ditimbulkan oleh perbuat korupsi tersebut. Selanjutnya, usaha untuk mengantisipasi korupsi seharusnya memiliki kesadaran untuk mengenali korupsi (Tanaka, 2001). Sudah tahu bahwa perbuatan korupsi dilarang, tetapi tetap saja dilakukan karena lingkungan sekitar dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang serupa dengan korupsi. Oleh karena itu, orang-orang sekitar secara tidak langsung menjadi contoh perbuatan yang dilarang tersebut. Apalagi tingkat sekolah dasar,

anak-anak mudah menirukan apa yang mereka lihat secara langsung.

Hal tersebut menjadi dasar pendidikan antikorupsi perlu digalakkan di sekolah dasar. Menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai langkah preventif dalam pendidikan di sekolah dasar. Hal ini bertujuan mengurangi tingkat korupsi tidak hanya cukup dengan hukuman saja, tetapi juga harus membangun sistem yang intensif salah satunya melalui kampanye pendidikan (Vaknin, 2009). Di sisi lain Akbar dan Vujic (2014) mengatakan untuk mencapai target yang tinggi perlu dilakukan pada semua level masyarakat, dari sekolah dasar sampai tempat kerja. Harapannya melalui pendidikan antikorupsi di sekolah dasar akan menciptakan generasi yang bersih dan bebas korupsi. Negara yang memiliki level yang lebih rendah dalam pendidikan, ketidakefektifan sistem hukum, dan rezim politik yang totaliter mengakibatkan pertumbuhan ekonomi lebih lambat, tingkat inflasi lebih tinggi, dan level korupsi lebih tinggi (Evrensel, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*literature review*) dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, berupa: buku, jurnal, majalah,

maupun sumber-sumber lainnya yang relevan. Metode penelitian kajian pustaka bertujuan untuk menemukan, menganalisis, mengklasifikasi, mensintesis, dan menyimpulkan dari sumber-sumber ilmiah untuk menemukan jawaban atas permasalahan (Hearn, Feuer, Higginson, and Sheldon, 1999).

Tahapan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni (1) menentukan tema penelitian yang menjadi urgen masalah, (2) mencari artikel-artikel yang relevan di Scoopus, Google Scholar, Pro Quest, Ebsco, dan sejenisnya dengan kata kunci, (3) mengklasifikasikan berbagai jenis artikel sesuai dengan konteks kebutuhan penelitian, (4) menganalisis artikel yang relevan, (5) mensintesis poin-poin penting dari berbagai artikel menjadi konsep praktis, dan (6) menulis hasil sintesis menjadi artikel penelitian kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar

Pendidikan memiliki komitmen terhadap berbagai tujuan, akan tetapi pembelajaran akademik tetap lebih penting (Arend, 2012). Pendidikan tidak hanya mengajarkan manusia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu, pendidikan mampu membentuk manusia

yang memiliki karakter baik. Pendidikan sering dinyatakan sebagai kebutuhan individu dan mengembangkan karakter manusia (Chitty, 2002). Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan siswa tentang antikorupsi. Usaha tersebut dapat dilakukan dalam lingkup sekolah yang dilaksanakan secara sistematis di segala aspek.

Kepala sekolah sebagai *leader* sekaligus pembuat kebijakan di sekolah dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi. Bagaimana seharusnya tujuan dapat dicapai maka kepala sekolah secara umum memberikan tanggung jawab kepada guru (Andersson, Gunnarsson, Rosen, 2015). Pembuat kebijakan seharusnya mengembangkan strategi yang sesuai untuk membangun pendidikan antikorupsi dan program pelatihan untuk manajer sektor umum dan privat (Akbar, Vujic, 2014). Kepala sekolah harus merancang rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam membangun pendidikan antikorupsi di sekolah dasar. Setelah itu diadakan komunikasi dan diskusi antara kepala sekolah dengan dewan guru, pegawai, siswa, komite sekolah, dan masyarakat. Sedangkan untuk menjangkau masyarakat dilakukan dengan cara yang inovatif (Manion, 2004). Semua pihak yang

berkaitan dengan sekolah tersebut perlu dilibatkan dalam menyusun cara yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi di sekolah.

Hasil kajian yang dilakukan oleh semua pihak dilanjutkan dengan langkah penerapan. Untuk memastikan bahwa pendidikan antikorupsi dapat dilakukan oleh semua warga sekolah, maka semua pihak yang terlibat harus benar-benar sadar, khususnya bagi guru karena guru merupakan seorang yang melakukan kontak langsung dengan siswa. Setelah itu, masing-masing warga sekolah melaksanakan hasil kajian sesuai dengan peranya. Kepala sekolah menyusun rencana dan mengevaluasi program pendidikan antikorupsi. Guru mengajarkan pendidikan anti korupsi di sekolah dengan cara yang baik. Komite sekolah dan masyarakat memberikan dukungan dan contoh dalam menerapkan pendidikan antikorupsi. Semua pihak atau warga sekolah bersinergi melakukan tugas sesuai peran dan tanggungjawab dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi.

Rencana yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan pertama, misalkan satu bulan pertama selanjutnya dievaluasi secara bersama-sama. Kejadian dan penemuan yang berlangsung selama menjalankan program pendidikan antikorupsi dicatat, kemudian dijadikan

bahan masukan dan evaluasi. Sehingga kesalahan ataupun kekurangan yang pernah dilakukan dapat diperbaiki dan disempurnakan menjadi lebih baik lagi.

Kurikulum sekolah berbasis pendidikan antikorupsi

Mengajarkan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar pada dasarnya mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa, seperti sifat sederhana, kejujuran, kesopanan, integritas, kerjasama, berkata dan berbuat benar, berani menegur jika orang lain melakukan kesalahan dan sebagainya. Untuk mengajarkan semua itu, diperlukan kurikulum yang tepat agar sikap antikorupsi siswa benar-benar menjadi kebiasaan. Sekolah sebagai tempat pembelajaran memberikan takaran yang pas tentang kebutuhan siswanya, sehingga kurikulum antikorupsi yang dibuat selaras dengan kurikulum pendidikan nasional.

Oleh karena itu, di sekolah dasar semua mata pelajaran diajarkan kepada siswa, maka kurikulum pendidikan antikorupsi tidak hanya ditekankan pada mata pelajaran sosial saja (PKn, Bahasa dan IPS) tetapi juga pada pelajaran sains (IPA dan Matematika). Pembelajaran antikorupsi berhubungan dengan pelajaran sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah (Becker, Hauser,

Kronthaler, 2013). Contohnya, dalam pelajaran IPA, siswa diajak untuk berdiskusi dampak ketidakjujuran ketika mengurangi bahan-bahan eksperimen, dalam pelajaran matematika guru memberikan contoh cara membelanjakan uang yang diberikan orang tua secara benar.

Dalam menyusun kurikulum berbasis pendidikan antikorupsi, semua guru menyiapkan dokumen kurikulum pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, guru-guru juga menyiapkan dokumen kurikulum yang telah disepakati di sekolah. Setelah itu, guru-guru mengadakan pertemuan untuk membahas kurikulum berbasis pendidikan antikorupsi. Dalam pertemuan tersebut, guru melakukan diskusi dengan cara menganalisis, mengusulkan ide, mengelompokkan, dan mengambil keputusan. Selama mengadakan pertemuan tersebut, mungkin akan memakan waktu sehari-hari, karena menentukan kurikulum adalah perkara sulit yang mana harus menyesuaikan dengan karakter sekolah.

Produk kurikulum berbasis antikorupsi di setiap sekolah akan terjadi perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Karena dalam menyusunnya, menyesuaikan kreativitas masing-masing sekolah,

akan tetapi pada intinya sama. Yakni, mewujudkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah. Oleh karena itu, masyarakat atau orang tua jika menemui perbedaan kurikulum pendidikan antikorupsi pada setiap sekolah, maka tidak perlu merisaukannya.

Konsep membelajarkan antikorupsi

Cara membelajarkan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan pada semua mata pelajaran. Seperti cara mengajarkan pelajaran yang lainnya, guru harus menyusun rencana pembelajaran yang jelas karena guru menjadi kunci utama dalam mengajarkan antikorupsi. Guru yang berkuasa berarti guru yang dapat mengonsep dan praktik pembelajaran sesuai dengan silabusnya (Jha, 2011). Setiap pertemuan dengan siswa, rencana pembelajaran tersebut memiliki ciri khas yang berbeda. Sehingga, siswa tidak akan cepat bosan dengan berbagai hal baru yang disampaikan oleh guru.

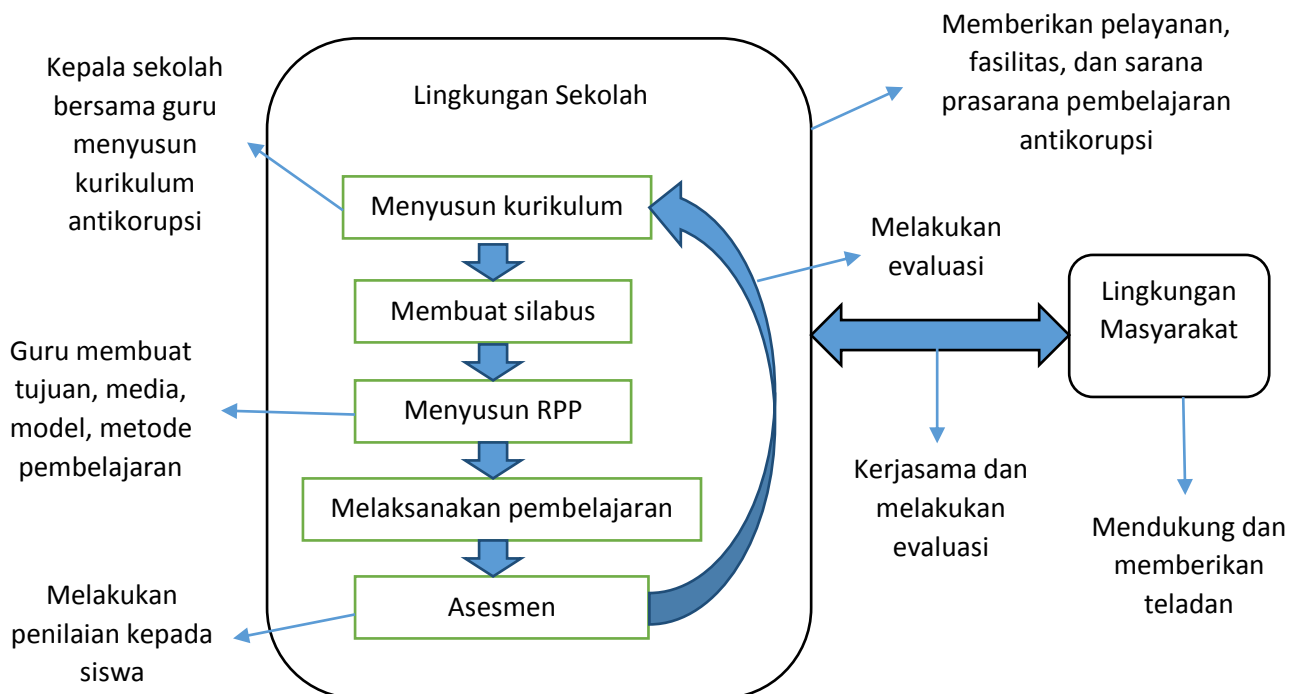
Dalam setiap rencana pembelajaran guru harus menentukan: materi pelajaran, tujuan pembelajaran, model pembelajaran, metode, alat dan bahan (jika ada), dan penilaian. Guru yang memiliki kemampuan dan potensi untuk mencapai tujuan sekolah dan pendidikan disebut guru yang berkuasa (Jha, 2011). Semua komponen tersebut disusun secara rinci

dalam setiap kegiatannya, baik yang dilakukan guru ataupun siswa. Tanpa mengurangi fokus materi pembelajaran, dalam mengajarkan antikorupsi guru sangat dianjurkan untuk memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk perbuatan korupsi.

Sebagai upaya memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa (*visual, auditory, dan kinesthetic*), guru dapat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, contohnya: pembelajaran kooperatif, pembelajaran langsung, *inquiry*, pembelajaran berbasis masalah, *role playing*, dan sebagainya. Sedangkan metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah: debat, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, observasi, dan studi kasus.

Selain itu, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami antikorupsi, maka dilakukan asesmen autentik. Asesmen autentik adalah penilaian yang dilakukan guru terhadap siswa kemampuan siswa dalam memahami antikorupsi dengan cara langsung. Asesmen autentik dilakukan selama guru mengajar sedangkan siswa sedang mengerjakan tugas sebenarnya (Kirkwood, Kendrick, 1999). Guru mencatat dan menilai sesuai kriteria skor yang dipilih. Bentuk asesmennya ada formatif dan sumatif seperti: pilihan ganda, uraian,

isian, benar-salah, dan mencocokkan. Berikut ini skema dalam membangun pendidikan antikorupsi di sekolah dasar.



Skema 1. Membangun pendidikan antikorupsi di Sekolah Dasar

Agar pembelajaran antikorupsi yang telah dilakukan antara guru dengan siswa lebih mengena, maka diperlukan kegiatan dan kebiasaan untuk siswa supaya dapat mempraktikkan secara langsung. Sekolah memberikan fasilitas dan berbagai contoh bertindak anti korupsi. Segala aktivitas di sekolah kegiatannya mencerminkan antikorupsi di seluruh lingkungan sekolah, seperti poster, mading, majalah dan kantin jujur. Fakta menunjukkan bahwa poster dapat meningkatkan pengetahuan seperti

penggunaan poster pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan guru (Ghadimi, Seraj, Keshavarz, Shamshiri, and Abiri, 2014).

Pendidikan antikorupsi yang telah dirintis oleh sekolah akan menjadi sia-sia jika masyarakat sekitar tidak mendukungnya. Membuat lebih hubungan dan kerjasama yang lebih besar antara konteks masyarakat, keluarga dan sekolah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan perilaku dan kedisiplinan siswa di sekolah (Sheldon, Epstein, 2002).

Jangan sampai di sekolah siswa diajarkan untuk selalu berkata benar, tetapi ketika di rumah siswa disuruh untuk berkata pura-pura. Siswa diajarkan disiplin dan tepat waktu ketika belajar di kelas, tetapi ketika di rumah semua kebutuhan mereka dilayani oleh orang tua.

Jika hal tersebut terjadi, maka program sekolah dengan masyarakat tidak selaras. Hal tersebut bukanya menjadikan siswa semakin kuat dan meningkat dalam memahami antikorupsi, tetapi justru membuat mereka bingung. Ibaratnya di sekolah dibangun karakter tetapi ketika di rumah dirusak lagi. Oleh karena itu, membangun kerjasama antara sekolah dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Persepsi ketekunan positif dan dukungan antara orang tua dan pendidik untuk teknologi informasi, secara signifikan pondasi kuat untuk perpanjangan pembelajaran siswa dari kelas ke lingkungan rumah (Kong, Li, 2009).

SIMPULAN

Pendidikan antikorupsi diperlukan di sekolah dasar sebagai upaya preventif sekaligus untuk menyiapkan generasi yang memiliki karakter antikorupsi. Selain itu, untuk membangun pendidikan antikorupsi tersebut dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kerjasama semua pihak tanpa

terkecuali, baik warga sekolah maupun warga masyarakat. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peran mereka masing-masing. Kepala sekolah sebagai leader di sekolah memiliki peran central dalam mewujudkan pendidikan antikorupsi, karena kepala sekolah berhak memutuskan kurikulum yang akan diambil dan dilaksanakan di sekolah.

Pendidikan antikorupsi diajarkan dengan mengintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Guru menyusun perencanaan pembelajaran dengan berbagai strategi yang dipilih sesuai dengan tingkat kreativitas yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar. Sedangkan untuk evaluasi hasil pembelajaran antikorupsi guru menggunakan assessment autentik berbentuk pilihan ganda, uraian, isian, benar-salah, dan mencocokkan. Supaya pendidikan antikorupsi lebih mengena ke siswa, maka sekolah menggunakan poster dan mading sebagai media pembelajaran dan pembiasaan sikap antikorupsi.

Daftar Pustaka

Akbar, Y, H., Vujic, V. (2014). *Explaining corruption: the role of national culture and its implication for international management*. *Emerald Insight*, 21 (2), 191-218.

- Andersson, I-M., Gunnarsson, K., and Rosen, G. (2015). *Role of headmasters, teachers, and supervisors in knowledge transfer about occupational health and safety to pupils in vocational education*. Elsevier, 6, 317-323.
- Arend, R. 2012. *Learning to teach ninth edition*. New York: McGraw Hill.
- Azfar, O., Lee, Y., and Swamy, A. (2001). *The cause and consequences of corruption. The annals of the American academy of political and social science*, 573, 42-56.
- Becker, K., Hauser, C., and Kronthaler, F. (2013). *Fostering management education to deter corruption: what do students know about corruption and its legal consequences?*. *Crime law soc change*, 60, 227-240.
- Centner, A, J. (2008). *Implementing international anti-corruption standards to improve Afganistan's education system*. *Case western reserve journal of international law*, 44, 847-874.
- Chitty, C. 2002. *Understanding school and schooling*. New York: Tailor and Francis Group.
- Evrensel, A. (2010). *Institutional and economic determinants of corruption: a cross-section analysis*. *Applied economics letters*, 17, 551-554.
- Ghadimi, S., Seraj, B., Keshavarz, H., Shamshiri, Ahmad R., Abiri, R. (2014). *The effect of using an educational poster on elementary school health teachers' knowledge of emergency management of traumatic dental injuries*. *Journal of dentistry*, 11(6), pp.620-628.
- Jha, A.S. (2011). *Teacher empowerment and institutional effectiveness in teacher education*. *I-manager's Journal on School Educational Technology*, 6 (3), 49-55.
- Kirkwood, J.J., and Kendrick, M.L. (1999). *Authentically assessing an assembly line*. *The Technology Teacher*, 58 (6), 8.
- Kong, S, C., and Li, K, M. (2009). *Collaboration between School and Parents to Foster Information Literacy: Learning in the Information Society*. *Computers & Education*, 52(2), 275-282.
- Manion, M. (2004). *Lessons for mainland China from anti-corruption reform in Hong Kong*. *The China review*, 4 (2), 81-97.
- Peercy, C., and Svenson, N. 2016. *The role of higher education in equitable human development*. *Springer Science+Business Media Dordrecht and UNESCO institute for Lifelong Learning*, 62, 139-160.
- Sheldon, S., and Epstein, J. (2002). *Improving student behavior and school discipline with family and community involvement*. *Education and Urban Society*, 35(1), 4-26.
- Tanaka, S. (2001). *Corruption in education sector: a suggestion for antisipatory strategy*. *International journal of educational management*, 15 (4), 158-166.
- Vaknin, S. (2009). *Financial crime and corruption 3rd edition*. Lidija Rangelovska: Sam vaknin's United Press International (UPI).
- Hearn, J., Feuer, D., Higginson, I, J., and Sheldon, T. (1999). *Systematic review*. *Journal Palliative Medicine*, 13, pp. 75-80.

